

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. (2018). *Hukum Kontrak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asser, C. (2016). *The Law of Contract. The Hague: Kluwer Law International*.
- Atmadja, I. Dewa Gede Palguna. (2019). *Teori Hukum dan Arah Pembangunan Hukum di Indonesia*. Denpasar: Udayana University Press.
- Bachtiar, S. (2020). *Manajemen Kontrak Konstruksi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munir Fuady. (2013). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Purwosutjipto, H.M.N. (2003). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku II: Hukum Perikatan Dagang*. Jakarta: Djambatan.
- Ridwan HR. (2019). *Hukum Administrasi Negara dan Perlindungan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjaifurrachman & Adjie, Habib. (2017). *Hukum Perjanjian Kontrak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Suharto, Eko. (2021). *Kebijakan Publik dan Pembangunan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wibowo, Rachmad. (2019). *Manajemen Konstruksi Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Wulansari, Sri. (2020). *Aspek Hukum Pelaksanaan Proyek Konstruksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
(Staatsblad 1847 No. 23).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Akreditasi dan Registrasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Jaminan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 273/KPTS/M/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kontrak Jasa Konstruksi.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Nomor 02/SE/DK/2021 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Risiko dalam Kontrak Jasa Konstruksi.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). (2020). Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI. Jakarta.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). (2021). Pedoman Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja Konstruksi. Jakarta: LPJK Nasional.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Konstruksi Indonesia. (2022). Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Konstruksi. Jakarta.

Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2019). SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu pada Jasa Konstruksi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, terkait jaminan pelaksanaan proyek konstruksi.

